

# **LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**PALANGKA RAYA  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan adalah sebesar Rp. - atau - % dari yang dianggarkan sebesar Rp. - dan Realisasi Belanja sampai dengan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 21.036.198.196** atau mencapai 93,97 % dari anggarannya sebesar **Rp. 22.384.902.446,25**
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar **Rp. 3.834.090.465,-** dan ekuitas dana sebesar **Rp. 3.834.090.465,-**
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target

kinerja APBD, Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, Kebijakan Akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan Keuangan Tahun 2020 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Palangka Raya, Januari 2021

PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**BARU, S.Pd., M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19700228 199803 1 007**

---

---

## DAFTAR ISI

---

---

Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	3
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan .....	5
Pernyataan Tanggung Jawab .....	6
Ringkasan .....	7
Laporan Realisasi Anggaran (LRA Perbandingan) .....	10
Neraca (Perbandingan) .....	11
Laporan Operasional .....	13
Laporan Perubahan Ekuitas .....	15
Catatan atas Laporan Keuangan .....	16
Bab I   Pendahuluan .....	16
1.1   Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	16
1.2   Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	18
1.3   Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .....	19
Bab II   Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Dan Pencapaian Target Kinerja APBD .....	21
2.1   Ekonomi Makro .....	21
2.2   Kebijakan Keuangan .....	23
2.3   Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD .....	24
Bab III   Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan .....	25
3.1   Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	25
3.2   Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan .....	25
Bab IV   Kebijakan Akuntansi .....	26
4.1   Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	26
4.2   Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	26
4.3   Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	29
4.4   Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP .....	44
Bab V   Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan .....	44

5.1 Rincian Dari Penjelasan Setiap Pos-Pos Laporan Keuangan.....	44
5.1.1 Pendapatan .....	44
5.1.2 Belanja .....	46
5.1.3 Aset .....	66
5.1.4 Dana Cadangan .....	71
5.1.5 Aset Lainnya .....	72
5.1.6 Extra Comptable.....	73
5.1.7 Kewajiban .....	73
5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional .....	74
5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	79
 Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan .....	 82
 Bab VII Penutup .....	 84
 Daftar Lampiran .....	 85

## INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan		
Pendapatan	V.1.1.a	Pendapatan Asli Daerah
Belanja		
	V.1.2	Belanja
	A	Belanja Pegawai
	B	Belanja Barang dan Jasa
	C	Belanja Modal
Aset		
	V.1.3	Aset lancar
	1	Kas di Bendahara Penerimaan
	2	Kas di Bendahara Pengeluaran
	3	Piutang Lain-lain
	4	Persediaan
	5	Aset Tetap
	5.1	Tanah
	5.2	Peralatan dan Mesin
	5.3	Gedung dan Bangunan
	5.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan
	5.5	Aset Tetap Lainnya
	5.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	5.7	Aset Lainnya
		1.Aset Tak berwujud
		2.Lain-lain Aset
Hutang	V.1.4	Hutang Jangka Pendek
Ekuitas Dana		
	V.1.5	Ekuitas Dana
	1	Ekuitas Dana Lancar
	2	Ekuitas Dana Investasi

---

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

---

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Operasional dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Januari 2021

PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**BARU, S.Pd., M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19700228 199803 1 007**

## RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode (1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020).

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran sebesar Rp. -.

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 21.036.198.196** atau mencapai 93,97 % dari anggarannya sebesar **Rp. 22.384.902.446,25**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	Tahun 2020		Tahun 2019	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	-	-	-	-
Belanja	22.384.902.446,25	21.036.198.196	28.188.529.185	26.331.440.776

## 2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah aset adalah sebesar **Rp. 3.834.090.465,-** yang terdiri dari aset lancar sebesar **Rp. 1.730.750,-** dan aset tetap sebesar **Rp. 3.809.297.054,-** dan aset lain-lain sebesar **Rp. 23.062.661,-**

Sementara itu jumlah ekuitas dana adalah sebesar **Rp. 3.834.090.465,-** Ringkasan neraca per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

			(dalam rupiah)
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan / (Penurunan)
Aset			
- Aset lancar	1,730,750.00	690,000.00	1,040,750.00
- Aset tetap	3,809,297,054.00	4,399,700,839.00	(590,403,785.00)
- Aset lainnya	23,062,661.00	23,062,661.00	-
- Jumlah Aset	3,834,090,465.00	4,423,453,500.00	(589,363,035.00)
- Kewajiban dan Ekuitas Dana	3,834,090,465.00	4,423,453,500.00	(589,363,035.00)

## 3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan Penggunaannya dikelola oleh pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam satu periode (2020), LO terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan akun Luar Biasa, untuk Tahun 2020 Laporan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah hanya pada *Beban Operasi* berjumlah sebesar, **Rp. 21.621.477.171,00** yang terdiri dari *Beban Pegawai-LO* sebesar, **Rp. 19.003.616.130,00**; *Beban Barang dan Jasa* sebesar, **Rp. 2.037.948.061,00**; *Beban Penyusutan dan Amortisasi* **Rp. 579.886.980,00**; dan *Beban Lain-lain* sebesar **Rp. 26.000,00** yang disajikan sebagai berikut :

Beban Operasi	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pegawai-LO	19,003,616,130	18,091,288,874	912,327,256	5.04
Beban Barang dan Jasa	2,037,948,061	7,594,819,617	-5,556,871,556	-73.17
Beban Penyusutan dan Amortisasi	579,886,980	593,238,680	-13,351,700	-2
Beban Lain-lain	26,000	26,000	0	0
<b>(Surplus/defisit-LO)</b>	<b>21,621,477,171</b>	<b>26,279,373,171</b>	<b>-4,657,896,000</b>	<b>-17.72</b>

#### 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah ekuitas awal untuk Tahun 2020 sebesar **Rp. 4.406.432.174,00** sementara jumlah surplus/defisit-LO adalah **(Rp. 21.621.477.171,00)**, dan ekuitas akhir sebesar **Rp. 3.810.636.394,00** Yang disajikan sebagai berikut :

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan %
Ekuitas Awal	4,406,432,174	4,354,364,569	1.20
Surplus/defisit-LO	-21,621,477,171	-26,279,373,171	-17.72
Ekuitas Akhir	3,810,636,394	4,406,432,174	-13.52

#### 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CALK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 1		URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)
<b>Bidang Pemerintahan</b> : 1.05		Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
<b>Unit Organisasi</b> : 1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 1.05.02.01		Satuan Polisi Pamong Praja

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5	<b>BELANJA</b>	22.384.902.446,25	21.036.198.196,00	93,97	26.331.440.776,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	22.381.702.446,25	21.032.998.196,00	93,97	25.681.740.776,00
5.1.1	Belanja Pegawai	20.212.291.605,00	18.999.760.903,00	94,00	18.091.234.975,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.169.410.841,25	2.033.237.293,00	93,72	7.590.505.801,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	649.700.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	649.700.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(22.384.902.446,25)	(21.036.198.196,00)	93,97	(26.331.440.776,00)
	<b>SISALEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(22.384.902.446,25)	(21.036.198.196,00)	93,97	(26.331.440.776,00)

Palangka Raya, 1 Januari 2020

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

**R. U. S. Pd., M.Si**  
 NIP. 19700228 199803 1 007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 1



**NERACA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 1 . 05	URLEAN WAJIB (PELAYANAN DASAR) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masy
<b>Unit Organisasi</b> : 1 . 05 . 02	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 1 . 05 . 02 . 01	Satuan Polisi Pamong Praja

URAIAN	2020	2019
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	1.730.750,00	690.000,00
Persediaan	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1.730.750,00</b>	<b>690.000,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANDANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANDANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	685.000.000,00	685.000.000,00
Peralatan dan Mesin	4.436.517.206,00	4.436.517.206,00
Gedung dan Bangunan	1.868.319.672,00	1.868.319.672,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	335.100.000,00	335.100.000,00
Aset Tetap Lainnya	24.750.000,00	24.750.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(3.540.389.824,00)	(2.949.986.039,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>3.809.297.054,00</b>	<b>4.399.700.839,00</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	60.000.000,00	60.000.000,00
Aset Lain-lain	23.062.661,00	23.062.661,00
Tagihan TGR	0,00	0,00
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(60.000.000,00)	(60.000.000,00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>23.062.661,00</b>	<b>23.062.661,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3.834.090.465,00</b>	<b>4.423.453.500,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00

NERACA

Halaman 1 dari 2

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 1 . 05	URLEAN WAJIB (PELAYANAN DASAR) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masy	
<b>Unit Organisasi</b> : 1 . 05 . 02	Satuan Polisi Pamong Praja	
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 1 . 05 . 02 . 01	Satuan Polisi Pamong Praja	
<b>URAIAN</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	23.454.071,00	17.021.326,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>23.454.071,00</b>	<b>17.021.326,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>23.454.071,00</b>	<b>17.021.326,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	3.810.636.394,00	4.406.432.174,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>3.834.090.465,00</b>	<b>4.423.453.500,00</b>



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019**

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 1		URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)			
<b>Bidang Pemerintahan</b> : 1.05		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
<b>Unit Organisasi</b> : 1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja			
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 1.05.02.01		Satuan Polisi Pamong Praja			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
8	<b>PENDAPATAN - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>BEBAN</b>	21.621.477.171,00	26.279.373.171,00	(4.657.896.000,00)	(17,72)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	19.003.616.130,00	18.091.288.874,00	912.327.256,00	5,04
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	2.037.948.061,00	7.594.819.617,00	(5.556.871.556,00)	(73,17)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	579.886.980,00	593.238.680,00	(13.351.700,00)	(2,25)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
LAPORAN OPERASIONAL		Halaman 1 dari 2			

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 1		URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)			
<b>Bidang Pemerintahan</b> : 1.05		Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat			
<b>Unit Organisasi</b> : 1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja			
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 1.05.02.01		Satuan Polisi Pamong Praja			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.7	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>		(21.621.477.171,00)	(26.279.373.171,00)	4.657.896.000,00	(17,72)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		(21.621.477.171,00)	(26.279.373.171,00)	4.657.896.000,00	(17,72)
<b>POS LUAR BIASA</b>					
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>		(21.621.477.171,00)	(26.279.373.171,00)	4.657.896.000,00	(17,72)
<p>Palangka Raya, 1 Januari 2020</p> <p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah</p>  <p><b>B A R U, S.Pd., M.Si</b></p> <p>NIP. 19700228 199803 1 007</p>					
LAPORAN OPERASIONAL					
Halaman 2 dari 2					



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 1 . 05	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat
<b>Unit Organisasi</b> : 1 . 05 . 02	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 1 . 05 . 02 . 01	Satuan Polisi Pamong Praja

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	4.406.432.174,00	4.354.364.569,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(21.621.477.171,00)	(26.279.373.171,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(10.516.805,00)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	21.036.198.196,00	26.331.440.776,00
EKUITAS AKHIR	3.810.636.394,00	4.406.432.174,00

Palangka Raya, 1 Januari 2020

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah



**BARU, S.Pd., M.Si**

NIP. 19700228 199803 1 007

---

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Informasi yang disajikan dalam laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### **1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan SOPD disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SOPD selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan SOPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SOPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SOPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan SOPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SOPD mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi SOPD apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan SOPD Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

### **1.3. SISTIMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SOPD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD SOPD

#### **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

#### **BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan
  - 5.1.1 Pendapatan
    - a. Pendapatan Asli Daerah

- 5.1.2 Belanja
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Modal
- 5.1.3 Aset
  - a. Aset Lancar
  - b. Aset Tetap
  - c. Aset Lain-lain
- 5.1.4 Kewajiban
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
- 5.1.5 Ekuitas Dana
  - a. Ekuitas Dana Lancar
  - b. Ekuitas Dana Investasi

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 EKONOMI MAKRO**

Satuan polisi pamong praja yang disingkat Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan surat perintah jawatan praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparat lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- f. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Satuan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Menertibkan dan menindak masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, peraturan gubernur, dan keputusan kepala daerah;
- c. Melakukan tindakan repressif non yudisial terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- d. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Melaporkan kepada kepolisian negara atas ditemukannya atau patut di duga adanya tindak pidana; dan
- f. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukan atau patut di duga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- g. Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretaris, Membawahkan:
  - a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang terdiri dari:
  - a. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan:
    - Kepala Sub Bidang Penegakan;
    - Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
    - Kepala Sub Bidang Pengawasan;
  - b. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
    - Kepala Sub Bidang Operasional dan Pengendalian;
    - Kepala Sub Bidang Ketertiban Umum;
    - Kepala Sub Bidang Ketenteraman Masyarakat;
  - c. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahkan:
    - Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini;
    - Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
    - Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas;
  - d. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
    - Kepala Sub Bidang Data dan Informasi;
    - Kepala Sub Bidang Pelatihan dan Mobilisasi;
    - Kepala Sub Bidang Perlindungan Masyarakat
4. Kelompok Jabatan Fungsional

## 2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Sampai saat ini aktivitas dan kegiatan telah kita lakukan, namun berapapun yang telah kita capai tersebut belum sepenuhnya dapat memuaskan kita.

Selanjutnya dihubungkan dengan tekad kita bersama untuk menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai tahun anggaran 2006 dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekwen dan telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati/Walikota. Maksud tersebut untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada:

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
3. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayan publik atau masyarakat secara langsung.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Agenda Pembangunan Nasional yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah (1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara bersamaan. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya.

Oleh karena itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut, daerah perlu melakukan sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, dan dengan

mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi pada pelaksanaan tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan dan disusun prioritas pembangunan daerah, yang juga merupakan prioritas pembangunan untuk tahun 2020 yaitu :

- a. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi.
- b. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor
- c. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Pembangunan Pedesaan.
- d. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
- e. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.
- f. Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- g. Penanganan Bencana, Penanggulangan Resiko Bencana dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.
- h. Pelestarian Lingkungan Hidup.
- i. Percepatan Pembangunan Pariwisata, Seni dan Budaya

Kesembilan prioritas pembangunan daerah tersebut diatas merupakan manifestasi untuk mewujudkan visi jangka menengah dan visi jangka panjang pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam rangka pencapaian visi daerah yang merupakan perwujudan riil dari tujuan pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mempertimbangkan kemajuan perkiraan yang dicapai dalam tahun 2020, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dihadapi dan dipecahkan pada tahun 2020, maka penjabaran lebih lanjut dari prioritas pembangunan daerah tahun 2020 tersebut harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui kebijakan, program dan kegiatan lintas bidang, lintas wilayah, lintas pemerintahan maupun lintas pembiayaan.

### **2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SOPD**

Sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan dan kinerja, dengan ini kami lampirkan pencapaian target kinerja.

## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SOPD Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 93,97 % dengan perincian :

Jumlah dana DPA dan DPPA SOPD 2020 = Rp. 22.384.902.446,25,-

Jumlah dan yang terealisasi sebesar = Rp. 21.036.198.196,-

#### **3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

Dalam Pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak terdapat hambatan dan kendala, semua berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Entitas pelaporan keuangan adalah SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah.

#### 4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

##### 1. Basis akuntansi (*accounting basis*);

- a. **Basis akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian. Kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban), dan ekuitas dana.
- b. **Transaksi penerimaan kas** atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.
- c. **Basis Kas untuk Laporan Perhitungan APBD** (Laporan Realisasi Anggaran) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima

oleh Kas Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah. Entitas Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba/rugi. Penentuan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban selain kas seperti bantuan, hibah dan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran).

- d. **Basis Akrual Untuk Neraca** berarti bahwa aktiva, utang, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

## **2. Prinsip nilai perolehan (*historical cost principle*);**

- a. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. Nilai perolehan lebih handal dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

## **3. Prinsip realisasi (*realization principle*);**

- a. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

## **4. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);**

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

**5. Prinsip periodisitas (*periodicity principle*);**

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

**6. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);**

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

**7. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);**

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

**8. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*).**

- a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah.

### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Informasi Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah :

#### **1. Periode Akuntansi**

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

#### **2. Pos-Pos Neraca**

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas :

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas Dana

#### **A. ASET**

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah mengatur perlakuan akuntansi aset. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aktiva tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparaturnya maupun publik.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lain-lain.

#### **1) ASET LANCAR**

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri atas :

##### **1.1. Kas di Kas Daerah**

1.1.1. Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.1.2. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

1.1.3. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

## **1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut.

1.2.1 Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan *stock opname*.

1.2.2 Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil *stock opname*.

## **2) PIUTANG**

2.1 Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

2.2 Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

2.3 Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

2.4 Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.

2.5 Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :

- Klarifikasi piutang menurut umur
- Klarifikasi piutang menurut debitur.

## **3) PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS / MATERIAL**

3.1 Persediaan Barang Pakai Habis / Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

- 3.2 Persediaan Barang Pakai Habis / Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, Perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan / alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja, dsb.
- 3.3 Persediaan Barang Pakai Habis / Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- 3.4 Persediaan Barang Pakai Habis / Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
- 3.5 Persediaan Barang Pakai Habis / Material dinilai berdasarkan :
  - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
  - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- 3.6 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan Barang Pakai Habis / Material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi.

#### **4) INVESTASI JANGKA PANJANG**

- 4.1 Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.2 Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD. Banama Tingang Makmur, PT. Bank Pembangunan Kaimantan Tengah dan PT. Palangka Nusantara.
  - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.3 Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 4.4 Penghasilan dari investasi saham diakui apabila Pemerintah

Daerah menerima deviden dan/atau bunga dari perusahaan yang diinvestasikan (*investee*) pada periode berjalan dan dicatat sebagai pendapatan.

- 4.5 Harga perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal tersebut.
- 4.6 Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal neraca.
- 4.7 Investasi dalam saham yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan, atau harga pasar yang mana lebih rendah (Lower Cost or Market).

## **5) ASET TETAP**

- 5.1 Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material.
- 5.2 Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.
- 5.3 Aset tetap antara lain terdiri dari :
  - Tanah
  - Jalan dan Jembatan
  - Bangunan Air (irigasi)
  - Instalasi
  - Jaringan
  - Bangunan Gedung
  - Bangunan Monumen
  - Alat-Alat Besar
  - Alat Angkutan
  - Alat Bengkel dan Alat Ukur
  - Alat Pertanian
  - Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
  - Alat Studio dan Alat Komunikasi
  - Alat-Alat Kedokteran

- Alat-Alat Laboratorium
- Buku dan Perpustakaan
- Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
- Hewan Ternak dan Tumbuhan
- Alat Keamanan

#### 5.4 Penjelasan Akun Aset Tetap

##### a. Tanah

Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, angkutan darat, tanah angkutan laut, tanah waduk, tanah saluran air, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.

##### b. Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya.

##### c. Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan Air meliputi waduk, pintu air, saluran air dan lain-lain sejenisnya.

##### d. Instalasi

Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain-lain sejenisnya.

##### e. Jaringan

Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.

##### f. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.

##### g. Bangunan Monumen

Bangunan Monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain sejenisnya.

##### h. Alat-alat Besar

Alat-alat Besar meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.

##### i. Alat-alat Angkutan

- Alat Angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tidak bermotor dan lain-lain sejenisnya.
- j. Alat Bengkel dan Alat Ukur  
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat ukur dan lain-lain sejenisnya.
- k. Alat Pertanian  
Alat Pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen penyimpan dan lain-lain sejenisnya.
- l. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga  
Alat-alat kantor dan Rumah Tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja kursi kerja dan lain-lain sejenisnya.
- m. Alat Studio dan Alat Komunikasi  
Alat Studio dan Alat Komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain-lain sejenisnya.
- n. Alat-alat Kedokteran  
Alat-alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran bagian penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya.
- o. Alat-alat Laboratorium  
Alat-alat laboratorium meliputi unit-unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain-lain sejenisnya.
- p. Buku dan Perpustakaan  
Buku dan Perpustakaan meliputi buku, terbitan berkala, barang-barang perpustakaan dan lain-lain sejenisnya.
- q. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan  
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan meliputi barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya dan lain-lain sejenisnya.
- r. Hewan/Ternak dan Tumbuhan  
Hewan/Ternak dan Tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain-lain sejenisnya.
- s. Alat Keamanan

Alat Keamanan meliputi alat keamanan dan lain-lain sejenisnya.

#### **5.4.1 Pengakuan**

- Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (maintenance), perbaikan (repairs), penambahan (additions), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (maintenance) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan : (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama (replacements) adalah

memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

#### **5.4.2 Pengukuran**

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan air (irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun

- gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.
- Bangunan Monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.
  - Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
  - Alat-alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
  - Alat bengkel dan alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
  - Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
  - Alat-alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
  - Alat kantor dan rumah tangga diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini

- meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
  - Alat-alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
  - Alat Laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
  - Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
  - Barang Bercorak kesenian/kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
  - Hewan/ ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
  - Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

### **5.4.3 Penilaian**

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

#### 5.4.4 Pengungkapan

- Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi) pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.
- Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

#### 6) **DANA CADANGAN**

- 6.1 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- 6.2 Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
- 6.3 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

#### 7) **ASET LAIN-LAIN**

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari :

- 7.1. **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.
- 7.2. **Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan Penjelasannya**

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.

Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

7.3. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Bangunan dalam pekerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pekerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggungjawab bangunan dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

**Lain-Lain Aktiva** adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

## **B. KEWAJIBAN**

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup defenisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Kewajiban adalah utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang.

### **1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

a. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

- 1) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo** merupakan sebagian dari utang pokok jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) **Utang Biaya Pinjaman** merupakan utang yang terjadi sebagai ikutan utang pokok, yang berupa bunga, denda

dan *commitmen fee/Commitmen Charge*. Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. *Comitment Fee* adalah utang yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

- 3) **Utang Jangka Pendek Lainnya** adalah utang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut diatas.
  - b. Kewajiban jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.
  - c. Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapanannya.

## 2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- a. **Utang Jangka Panjang** merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aktiva Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- b. **Utang Bunga** merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) satu periode akuntansi. Utang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

- c. **Utang Belanja** merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah di bebaskan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- d. **Utang Pajak** merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang Pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun belum disetorkan ke KPKN.
- e. **Pendapatan Diterima di Muka** merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening Pendapatan Diterima di Muka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi sampai namun telah dilakukan penerimaan kas, sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan
- f. **Utang Lain-lain** merupakan utang lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis rekening utang.

### C. EKUITAS DANA

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang.

Ekuitas Dana terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

#### a. Ekuitas Dana Lancar

- Ekuitas Dana Lancar adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari investasi dan dana cadangan.
- Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan lainnya.
- Saldo rekening Ekuitas Dana Lancar diukur berdasarkan nilai nominal yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.
- Jenis Ekuitas Dana Lancar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

Ekuitas Dana Lancar yang dikemukakan dalam Laporan

Keuangan ini terdiri atas :

1. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)** tahun pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun anggaran berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja dan dinilai berdasarkan nilai nominal.
2. **Cadangan untuk piutang** adalah kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek dan dinilai berdasarkan saldo piutang jangka pendek yang disajikan di Neraca.
3. **Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang adalah** perkiraan lawan ekuitas dana umum yang merupakan pengurangan kekayaan bersih. Pos ini dinilai berdasarkan nilai nominal utang jangka panjang.
4. **Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek** adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum, yang merupakan pengurangan kekayaan bersih pemerintah selama Tahun Anggaran 2006. Pos ini dinilai sebesar nilai nominal utang jangka pendek yang terbayar dalam Tahun Anggaran ini.
5. **Diinvestasikan dalam bentuk saham adalah** kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang berupa pada perusahaan BUMD.
6. **Diinvestasikan dalam bentuk asset daerah yang dipisahkan adalah** kekayaan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap pada Perusahaan BUMD.

b. **Ekuitas Dana Investasi**

- Ekuitas Dana Investasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva tetap.
- Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana investasi yang dibeli selama periode berjalan.

c. **Ekuitas Dana Cadangan**

- Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang dicadangkan.
- Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer kedalam periode berjalan.

- Saldo rekening Ekuitas Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal dana yang ditransfer ke atau dari dana cadangan.
- Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan Ekuitas Dana Dicadangkan diantaranya :
  - Peruntukan, batasan dan jenis investasi dana cadangan.
  - Jenis Ekuitas dana cadangan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

#### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH**

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan dan
4. Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan SOPD kepada para pemakai/stakeholders.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup Keuangan Daerah, maka dikemukakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya sesuai struktur APBD SOPD berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana sebagai berikut:

#### 5.1 Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

##### 5.1.1 PENDAPATAN

Rp. -

Realisasi penerimaan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai sebesar Rp,- atau 0% dari target yang ditetapkan sebesar Rp,- yang dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dan**  
**Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realisasi PAD pada **Satuan Polisi Pamong Praja** Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan berjumlah Rp,- atau 0% dari target yang ditetapkan sebesar Rp,-. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi pendapatan dalam APBD, maka tidak terdapat kontribusi PAD pada tahun ini. Secara garis besar gambaran realisasi PAD tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Realisasi PAD Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Juni Tahun Anggaran 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Retribusi Daerah	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi PAD pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Retribusi Daerah Rp. -**

Realisasi penerimaan retribusi daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp.0,- atau atau 0% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.0,- sehingga pada Laporan Keuangan ini realisasi penerimaannya nihil.

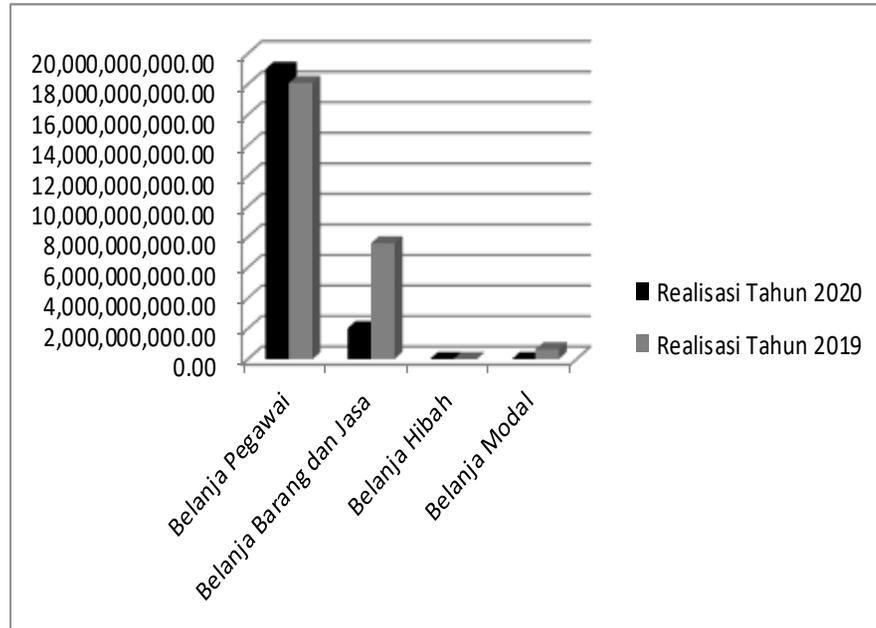
Rincian realisasi penerimaan retribusi daerah pada LRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Realisasi Retribusi Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020			Realisasi TA 2019 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5.1.2 BELANJA

Komposisi realisasi belanja operasi dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:



**a. Belanja Pegawai Rp. 18.999.760.903,00**

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 17.803.497.605,00 atau 93,70 % dari total anggaran SOPD. Sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 18.999.760.903,00 atau 106,72 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.196.263298,00 atau 0,65 %. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 18.091.234.975,00

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Realisasi Belanja Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**  
**Tahun Anggaran 2020 dan Perbandingannya dengan Tahun**  
**Anggaran 2019**

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/ (Turun) (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
<b>Belanja Pegawai</b>					
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.108.017.737,00	3.808.215.054,00	92,70	3.816.044.378,00	-0,21
- Tunjangan Keluarga	460.606.673,00	410.635.619,00	89,15	404.004.122,00	1,64
- Tunjangan Jabatan	258.300.000,00	236.290.000,00	91,48	226.760.000,00	4,20
- Tunjangan Fungsional	133.455.000,00	94.310.000,00	0,00	64.740.000,00	0,00
- Tunjangan Fungsional Umum	141.634.500,00	112.580.000,00	79,49	127.880.000,00	-11,96
- Tunjangan Beras	225.363.798,00	203.427.780,00	61,12	207.845.400,00	-92,65
- Tunjangan PPh/Khusus	25.000.000,00	15.279.532,00	50,97	13.521.269,00	-99,62
- Pembulatan Gaji	99.897,00	50.918,00	50,97	54.992,00	-100,00
- Iuran Asuransi Kesehatan			#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
- Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja			#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
- Tambahan Penghasilan PNS	4.237.000.000,00	3.669.450.000,00	86,60	3.021.392.000,00	21,45
- Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JKM)			#DIV/0!	0,00	0,00
- Belanja Honorarium PNS	689.120.000,00	638.320.000,00	92,63	1.546.370.000,00	-58,72
- Belanja Honorarium Non Pegawai			#DIV/0!	20.300.000,00	-100,00
- Belanja Honorarium Non PNS	7.524.900.000,00	9.811.202.000,00	0,00	8.642.322.814,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.803.497.605,00</b>	<b>18.999.760.903,00</b>	<b>106,72</b>	<b>18.091.234.975,00</b>	<b>5,02</b>

**b. Belanja Barang dan Jasa**

**Rp. 2.033.237.293,00**

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 1.194.603.578 atau 6,29 % dari total anggaran SOPD. Sampai akhir tahun anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 2.033.237.293 atau 170,2 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 838.633.715 atau 70,2 %. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 838.633.715,00

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	92,982,285.00	137,339,300.00	147.70	350,518,250.00	-60.82
- Belanja Bahan / Material	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
- Belanja Jasa Kantor	198,797,043.00	322,687,355.00	162.32	1,051,807,534.00	-69.32
- Belanja Premi Asuransi	268,905,000.00	433,476,486.00	161.20	257,001,387.00	68.67
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50,000,000.00	227,443,502.00	454.89	266,052,300.00	-14.51
- Belanja Cetak dan Penggandaan	49,650,000.00	54,712,500.00	110.20	184,212,050.00	-70.30
- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	-	#DIV/0!	154,535,000.00	-100.00
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	#DIV/0!	3,000,000.00	-100.00
- Belanja Makanan dan Minuman	43,745,000.00	49,097,500.00	112.24	395,565,100.00	-87.59
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	0.00	244,120,000.00	-100.00
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	-	#DIV/0!	20,000,000.00	-100.00
- Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	-	0.00	120,000,000.00	0.00
- Belanja Perjalanan Dinas	490,524,250.00	808,480,650.00	164.82	4,525,996,180.00	-82.14
- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	-	0.00	#DIV/0!	13,698,000.00	-100.00
- Belanja Pemeliharaan	-	0.00	#DIV/0!	0.00	-
- Belanja Konsultasi	-	0.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	0.00	#DIV/0!	4,000,000.00	-100.00
-					
-					
-					
<b>Jumlah</b>	<b>1,194,603,578.00</b>	<b>2,033,237,293.00</b>	<b>170.20</b>	<b>7,590,505,801.00</b>	<b>-73.21</b>

**1. Belanja Pakai Habis Kantor Rp. 137.339.300,00**

Belanja Pakai Habis Kantor dianggarkan sebesar Rp. 92.982.285 atau 7,78 % dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 137.339.300 atau 147,7 % sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp. 44.357.015 atau 47,7 %. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Pakai Habis Kantor sebesar 60,82 %. Rincian realisasi Belanja Pakai Habis Kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Belanja Alat Tulis Kantor	Rp69,472,285	Rp113,841,500	163.87	Rp193,490,350	-41.16
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	Rp5,000,000	Rp5,000,000	100.00	Rp15,330,000	-67.38
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	Rp4,650,000	Rp4,638,000	99.74	Rp2,850,000	62.74
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp6,860,000	Rp6,860,000	100.00	Rp20,592,000	-66.69
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!
Belanja Dokumentasi	Rp5,250,000	Rp5,249,800	100.00	Rp24,454,900	-78.53
Belanja Bahan Dekorasi	Rp1,750,000	Rp1,750,000	100.00	Rp14,864,000	-88.23
Belanja Bahan Diklat	Rp0	Rp0	0.00	78,937,000.00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>92,982,285.00</b>	<b>137,339,300.00</b>	<b>147.70</b>	<b>350,518,250.00</b>	<b>-60.82</b>

**2. Belanja Bahan/Material Rp. 0,00**

Belanja Bahan/Material dianggarkan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,0% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0,0%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi

Belanja Bahan/Material sebesar 100%. Rincian realisasi Belanja Bahan/Material dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Bahan Baku Bangunan	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!
- Belanja Bahan Perlengkapan Kantor	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	-	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>

### 3. Belanja Jasa Kantor **Rp. 322.687.355,00**

Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp.198.797.043,00 atau 16,64% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 322.687.355 atau 162,32% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 123.890.312 atau 62,32%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar 69,32%. Rincian realisasi Belanja Jasa Kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Telepon	Rp900,000	Rp0	0.00	Rp387,270	-100.00
- Belanja Listrik	Rp97,065,000	Rp175,135,463	180.43	Rp128,092,864	36.73
- Belanja surat kabar/majalah	Rp10,000,000	Rp4,610,000	46.10	Rp21,380,000	-78.44
- Belanja kaw at/ faksimili/ internet	Rp15,802,043	Rp30,891,892	195.49	Rp16,602,400	86.07
- Belanja Paket/Pengiriman	Rp630,000	Rp0	0.00	Rp0	#DIV/0!
- Belanja Transportasi dan Akomodasi	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp6,600,000	-100.00
- Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	Rp16,050,000	Rp56,050,000	349.22	Rp39,250,000	42.80
- Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	Rp12,000,000	Rp12,000,000	100.00	Rp131,850,000	-90.90
- Belanja Jasa Pengamanan	Rp39,000,000	Rp44,000,000	112.82	Rp684,775,000	-93.57
- Belanja Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	Rp2,500,000	Rp0	0.00	Rp10,000,000	-100.00
- Belanja Jasa Pembaca Doa	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp400,000	-100.00
- Belanja Jasa Pihak Ketiga	Rp4,850,000	Rp0	0.00	12,070,000.00	-100.00
- Belanja Jasa Pemandu Lagu/Dirigen	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp400,000	-100.00
<b>Jumlah</b>	<b>198,797,043.00</b>	<b>322,687,355.00</b>	<b>162.32</b>	<b>1,051,807,534.00</b>	<b>-69.32</b>

#### 4. Belanja Premi Asuransi **Rp. 433.476.486,00**

Belanja Premi Asuransi dianggarkan sebesar Rp. 268.905.000,00 atau 22,51% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 433.476.486,00 atau 161,2%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat kenaikan realisasi Belanja Premi Asuransi sebesar 68,67%. Rincian realisasi Belanja Premi Asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan	265,905,000.00	430,483,486.00	161.89	254,215,387.00	69.34
- Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	3,000,000.00	2,993,000.00	99.77	2,786,000.00	7.43
<b>Jumlah</b>	<b>268,905,000.00</b>	<b>433,476,486.00</b>	<b>161.20</b>	<b>257,001,387.00</b>	<b>68.67</b>

**5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp. 227.443.502,00**

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00 atau 4,18% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan Juni Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 227.443.502,00 atau 454,89% sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp. 177.443.502,00 atau 354,89%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar 14,51%. Rincian realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Belanja Jasa Service	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp5,500,000	-100.00
Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp8,922,000	Rp194,345,102	2,178.27	Rp129,907,100	49.60
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	Rp30,000,000	Rp9,593,400	31.98	Rp12,305,200	-22.04
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp11,078,000	Rp23,505,000	212.18	Rp118,340,000	-80.14
<b>Jumlah</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>227,443,502.00</b>	<b>454.89</b>	<b>266,052,300.00</b>	<b>-14.51</b>

**6. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 54.712.500,00**

Belanja Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 49.650.000 atau 4,15% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 54.712.500 atau 110,2% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.062.500 atau 10,19%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja cetak dan Penggandaan sebesar 70,30%. Rincian realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Cetak	Rp11,683,000	Rp11,373,000	97.35	Rp42,215,800	-73.06
- Belanja Penjilidan	Rp920,000	Rp980,000	106.52	Rp12,690,000	-92.28
- Belanja Penggandaan	Rp37,047,000	Rp42,359,500	114.34	Rp129,306,250	-67.24
<b>Jumlah</b>	<b>49,650,000</b>	<b>54,712,500</b>	<b>110.20</b>	<b>184,212,050</b>	<b>-70.30</b>

## 7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp. 0,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dianggarkan sebesar Rp. 0 atau 0% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar 100%. Rincian realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp43,920,000	-100.00
- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp110,615,000	-100.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>Rp154,535,000</b>	<b>-100.00</b>

## 8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp. 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas dianggarkan sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar 100%. Rincian realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Sew a Sarana Mobiitas Darat	-	-	#DIV/0!	3,000,000	-100.00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-100.00</b>

## 9. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp. 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dianggarkan sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebesar 100%. Rincian realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Sew a Tenda	-	-	#DIV/0!	0.00	100.00
- Belanja Sew a Sound System	-	-	#DIV/0!	4,000,000.00	100.00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>-100.00</b>

## 10. Belanja Makanan dan Minuman Rp. 49.097.500,00

Belanja Makanan dan Minuman dianggarkan sebesar Rp. 43.745.000 atau 3,66% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 telah terealisasikan sebesar Rp. 49.097.500 atau 112,24% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.352.500 atau 12,23%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Makanan dan Minuman sebesar 87,59%. Rincian realisasi Belanja Makanan dan Minuman dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai	Rp12,112,500	Rp12,465,000	0.00	Rp36,496,500	-65.85
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp10,132,500	Rp10,132,500	100.00	Rp112,272,500	-90.98
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Rp5,000,000	Rp10,000,000	200.00	Rp19,996,100	-49.99
- Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	Rp16,500,000	Rp16,500,000	100.00	Rp226,800,000	-92.72
<b>Jumlah</b>	<b>43,745,000</b>	<b>49,097,500</b>	<b>112.24</b>	<b>395,565,100</b>	<b>-87.59</b>

### 11. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Rp. 0,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dianggarkan sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Pakaian Kerja Lapangan sebesar 100%. Rincian realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	#DIV/0!	244,120,000	-100.00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>244,120,000</b>	<b>-100.00</b>

### 12. Belanja Pakaian Kerja Rp. 0,00

Belanja Pakaian Kerja dianggarkan sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Pakaian Kerja Lapangan sebesar 100%. Rincian realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	-	#DIV/0!	20,000,000	-100.00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>20,000,000</b>	<b>-100.00</b>

**13. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Rp. 0,00**

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu dianggarkan sebesar Rp.0,00 atau 0% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Rincian realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Pakaian Olahraga	-	-	#DIV/0!	120,000,000.00	-100.00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>-100.00</b>

**14. Belanja Pemeliharaan Rp. 0,00**

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 0,00 atau 0%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar 100%. Rincian realisasi Belanja Pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

**15. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 808.480.650,00**

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp. 490.524.250 atau 41,06% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 808.480.650 atau 164,82% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 317.956.400 atau 64,82%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar 82,14%. Rincian realisasi Belanja Perjalanan Dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp392,270,000	Rp658,824,400	167.95	Rp2,351,044,034	-71.98
- Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah	Rp98,254,250	Rp149,656,250	152.32	Rp2,174,952,146	-93.12
<b>Jumlah</b>	<b>490,524,250</b>	<b>808,480,650</b>	<b>164.82</b>	<b>4,525,996,180.00</b>	<b>-82.14</b>

## 16. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Rp. 0,00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dianggarkan sebesar Rp.0,00 atau 0% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis sebesar 100%. Rincian realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
- Belanja Diklat Formal	-	-	#DIV/0!	13,698,000.00	-100.00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>13,698,000</b>	<b>-100.00</b>

## 17. Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 382.100.000,00

Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 366.700.000,00 atau 2,06% dari total anggaran Belanja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 382.100.000,00 atau 104,2% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 15.400.000,00 atau 4,2%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar 67,12%. Rincian

realisasi Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	366,700,000	382,100,000	104.20	1,161,950,000	-67.12
<b>Jumlah</b>	<b>366,700,000</b>	<b>382,100,000</b>	<b>104.20</b>	<b>1,161,950,000</b>	<b>-67.12</b>

### 18. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

**Rp. 0,00**

Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.0,00 atau 0% dari total anggaran Belanja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasikan sebesar Rp.0,00 atau 0% sehingga terdapat sisa anggaran Rp.0,00 atau 0%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 0%. Rincian realisasi Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	#DIV/0!	42,000,000	-100.00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>42,000,000</b>	<b>-100.00</b>

### 19. Belanja Honorarium PNS lainnya

**Rp. 21.200.000,00**

Belanja Honorarium PNS Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 63.600.000,00 atau 0,36% dari total anggaran Belanja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasikan sebesar Rp. 21.200.000,00 atau 33% sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 42.400.000,00 atau 67%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Honorarium PNS Lainnya sebesar 64,90%. Rincian realisasi Belanja Honorarium Tim PNS Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Honorarium PNS Lainnya			#DIV/0!	60,400,000	-100.00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>60,400,000</b>	<b>-100.00</b>

## 20. Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang **Rp. 235.020.000,00**

Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang dianggarkan sebesar Rp. 258.820.000 atau 1,45% dari total anggaran Belanja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 telah terealisasi sebesar Rp. 235.020.000 atau 90,80% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 23.800.000 atau 9,2%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan realisasi Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang sebesar 3,53%. Rincian realisasi Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang	258,820,000.00	235,020,000.00	90.80	243,620,000.00	-3.53
<b>Jumlah</b>	<b>258,820,000</b>	<b>235,020,000</b>	<b>90.80</b>	<b>243,620,000.00</b>	<b>-3.53</b>

## 21. Belanja Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap **Rp. 9.811.202.000,00**

Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap dianggarkan sebesar Rp. 7.524.900.000 atau 42,27% dari total anggaran Belanja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 9.811.202.000 atau 130,38% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.286.302.000 atau 30,38%. Dibandingkan tahun 2019 terdapat kenaikan realisasi Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar 13,53%. Rincian realisasi Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Belanja Honorarium Pegawai Honorar/tidak Tetap	7,524,900,000	9,811,202,000	130.38	8,642,322,814	13.53
<b>Jumlah</b>	<b>7,524,900,000</b>	<b>9,811,202,000</b>	<b>130.38</b>	<b>8,642,322,814</b>	<b>13.53</b>

**c. Belanja Modal Rp. 3.200.000,00**

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 3.200.000,00 atau 0,01% dari total anggaran SOPD. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp3.200.000,00 atau 100% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 649.700.000,00. Dengan demikian terdapat penurunan realisasi Belanja Modal pada tahun 2020 sebesar 99,51% jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,200,000	3,200,000.00	100.00	649,700,000	-99.51
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	0.00	#DIV/0!	0	#DIV/0!
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	0.00	#DIV/0!	0	#DIV/0!
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0.00	#DIV/0!	0	#DIV/0!
-			#DIV/0!		#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>100.00</b>	<b>649,700,000</b>	<b>-99.51</b>

**1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 3.200.000,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 3.200.000,00 atau 100% dari total Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 3.200.000,00 atau 100% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 649.700.000. Dengan demikian terdapat penurunan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2020 sebesar 99,51% jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!
- Pengadaan Alat Kantor	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp22,041,000	-100.00
- Pengadaan Alat Rumah Tangga	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp279,200,000	-100.00
- Pengadaan Komputer	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp298,500,000	-100.00
- Pengadaan Alat Studio	Rp3,200,000	Rp3,200,000	100.00	Rp24,959,000	-87.18
- Pengadaan Alat Komunikasi	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp25,000,000	-100.00
-			#DIV/0!		0.00
<b>Jumlah</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>100.00</b>	<b>649,700,000</b>	<b>-99.51</b>

**a. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Rp. 0,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat dianggarkan sebesar Rp. 0,00 atau 0,0% dari total Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,0% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0,0 %. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 0,00.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp0	Rp0	0.00	Rp0	#DIV/0!
- Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!
- Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp0	#DIV/0!
-			#DIV/0!		#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

**b. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Rp. 0,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dianggarkan sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari total Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasikan sebesar Rp. 0,00 atau 0% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0,0%. Sedangkan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp 22.041.000,00. Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
- Pengadaan Alat Kantor Lainnya	-	-	#DIV/0!	22,041,000.00	- 100.00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>22,041,000</b>	<b>- 100.00</b>

**c. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Rp. 0,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari total Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasikan sebesar Rp.0,00 atau 0% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp 279.200.000,00.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2020 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Pengadaan Meubelair	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp192,500,000	-100.00
- Pengadaan Alat Pendingin	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp71,900,000	-100.00
- Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp9,800,000	-100.00
- Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp0	Rp0	#DIV/0!	Rp5,000,000	-100.00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>279,200,000</b>	<b>-100.00</b>

**d. Belanja Modal Pengadaan Komputer Rp. 0,00**

Belanja Modal Pengadaan Komputer dianggarkan sebesar Rp.0,00 atau 0% dari total Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 100% sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 298.500.000,00.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	-	-	#DIV/0!	261,000,000	- 100.00
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	-	-	#DIV/0!	37,500,000	- 100.00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>298,500,000</b>	<b>- 100.00</b>

**e. Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Rp. 3.200.000,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dianggarkan sebesar Rp. 3.200.000,00 atau 100% dari total Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 3.200.000,00 atau 100% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Sedangkan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 24.959.000,00. Dengan demikian terdapat penurunan realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Studio pada tahun 2020 sebesar 87,18% jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Pengadaan Peralatan Studio Visual	-	-	#DIV/0!	6,950,000	-100.00
- Pengadaan Peralatan Studio Video dan film	3,200,000	3,200,000	100.00	18,009,000	-82.23
<b>Jumlah</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>100.00</b>	<b>24,959,000.00</b>	<b>-87.18</b>

**f. Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Rp. 0,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi dianggarkan sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari total Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% sehingga tidak terdapat sisa anggaran atau 0,0%. Sedangkan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 25.000.000,00. Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020			31 Desember 2019 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	-	-	#DIV/0!	25,000,000.00	-100.00
<b>Jumlah</b>	-	-	#DIV/0!	<b>25,000,000.00</b>	-100.00

### 5.1.3. ASET

#### 5.1.3.1 ASET LANCAR

##### 5.1.3.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019
Rekening Bank	Rp -	Rp -
Uang Tunai	Rp -	Rp -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran.

##### 5.1.3.1.2 Persediaan Rp. 0,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) untuk mendukung kegiatan.

Persediaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Alat Tulis Kantor	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**5.1.3.1.3 Beban Dibayar Dimuka****Rp. 1.730.750,00**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 1.730.750,00 dan Rp. 690.000,00. Beban dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Jenis	Beban dibayar dimuka Tahun 2020	Beban dibayar dimuka Tahun 2019
1. Pajak Kendaraan Bermotor	-	-
2. Biaya Premi Asuransi gedung	1.730.750	690.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.730.750</b>	<b>690.000</b>

**5.1.3.2 ASET TETAP****Rp. 3.809.297.054,00**

Aset Tetap milik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.809.297.054,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01/01/2020	Penambahan Aset 2020	Mutasi		Penghapusan s/d 2020	Saldo Akhir 31/12/2020
			Tambah	Kurang		
Tanah	685,000,000.00		-	-	-	685,000,000.00
Peralatan dan Mesin	4,436,517,206.00	-	-	-	-	4,436,517,206.00
Gedung dan Bangunan	1,868,319,672.00		-	-	-	1,868,319,672.00
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	335,100,000.00		-	-	-	335,100,000.00
Aset Tetap Lainnya	24,750,000.00		-	-	-	24,750,000.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-		-	-	-	-
<b>Jumlah Aset Tetap sebelum Penyusutan</b>	<b>7,349,686,878.00</b>	-			-	<b>7,349,686,878.00</b>
Akumulasi Penyusutan	(2,960,502,844.00)	(579,886,980.00)	-	-	-	(3,540,389,824.00)
<b>Jumlah Aset Tetap Sesudah Penyusutan</b>	<b>4,389,184,034.00</b>		-	-	-	<b>3,809,297,054.00</b>

**5.1.3.2.1 Tanah****Rp. 685.000.000,00**

Aset Tanah milik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 685.000.000,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 685.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2020 (a)</b>	<b>Rp</b>	<b>685.000.000,00</b>
Penambahan	Rp	-
Pengurangan	Rp	-
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))</b>	<b>Rp</b>	<b>685.000.000,00</b>

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1**

**5.1.3.2.2 Peralatan dan Mesin****Rp. 4.436.517.206,00**

Aset Peralatan dan Mesin milik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.436.517.206,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.786.817.206,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2020 (a)</b>	<b>Rp</b>	<b>4,436,517,206.00</b>
Penambahan		
Pengurangan (Reklas)	Rp	-
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))</b>	<b>Rp</b>	<b>4,436,517,206.00</b>

Penambahan senilai Rp 0,00 dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, pengurangan Rp 0,00.

#### 5.1.3.2.3 Gedung dan Bangunan

**Rp. 1.868.319.672,00**

Aset Gedung dan Bangunan milik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.868.319.672,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.868.319.672,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2020 (a)</b>	<b>Rp</b>	<b>1.868.319.672,00</b>
Penambahan	Rp	-
Pengurangan	Rp	-
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))</b>	<b>Rp</b>	<b>1.868.319.672,00</b>

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1**

#### 5.1.3.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

**Rp 335.100.000,00**

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 335.100.000,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 335.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2020 (a)</b>	<b>Rp</b>	<b>335.100.000,00</b>
Penambahan	Rp	-
Pengurangan	Rp	-
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))</b>	<b>Rp</b>	<b>335.100.000,00</b>

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 8**

**5.1.3.2.5 Aset Tetap Lainnya****Rp. 24.750.000,00**

Aset Tetap Lainnya milik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 24.750.000,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 24.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2020 (a)</b>	<b>Rp</b>	<b>24.750.000,00</b>
Penambahan	Rp	-
Pengurangan	Rp	-
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))</b>	<b>Rp</b>	<b>24.750.000,00</b>

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1**

**5.1.3.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan****Rp. 0,00**

Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2020 (a)</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
Penambahan	Rp	-
Pengurangan	Rp	-
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1**

**5.1.3.2.7 Akumulasi Penyusutan****(Rp. 3.350.389.824,00)**

Akumulasi Penyusutan milik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 sebesar (Rp 3.350.389.824,00) sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp 2.949.986.039,00) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2020 (a)</b>	<b>Rp</b>	<b>(2,960,502,844.00)</b>
Penambahan	Rp	(579,886,980.00)
Pengurangan	Rp	-
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	(579,886,980.00)
<b>Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))</b>	<b>Rp</b>	<b>(3,540,389,824.00)</b>

No	Nama Barang Inventaris	Nilai Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai buku
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Tanah</b>	<b>685,000,000.00</b>		<b>685,000,000.00</b>
	Tanah	685,000,000.00		685,000,000.00
<b>2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>4,436,517,206.00</b>	<b>3,122,975,527.00</b>	<b>1,313,541,679.00</b>
	Alat-Alat Berat	-	-	-
	Alat-Alat Angkutan	1,879,766,145.00	1,322,941,015.00	556,825,130.00
	Alat Bengkel/Alat Ukur	22,041,000.00	4,775,550.00	17,265,450.00
	Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-
	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,317,976,373.00	978,889,887.00	339,086,486.00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	181,399,000.00	108,666,337.00	72,732,663.00
	Alat-Alat Kedokteran	-	-	-
	Alat Laboratorium	-	-	-
	Alat Keamanan	46,550,000.00	40,084,722.00	6,465,278.00
	Komputer	988,784,688.00	667,618,016.00	321,166,672.00
<b>3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>1,868,319,672.00</b>	<b>367,441,260.00</b>	<b>1,500,878,412.00</b>
	Bangunan Gedung	1,868,319,672.00	367,441,260.00	1,500,878,412.00
	Bangunan Monumen	-	-	-
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Instalasi</b>	<b>335,100,000.00</b>	<b>49,973,037.00</b>	<b>285,126,963.00</b>
	Jalan dan Jembatan	-	-	-
	Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-
	Instalasi	335,100,000.00	49,973,037.00	285,126,963.00
	Jaringan			
<b>5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>24,750,000.00</b>	-	<b>24,750,000.00</b>
	Barang Bercorak Kebudayaan	24,750,000.00		

#### 5.1.4. DANA CADANGAN

##### 5.1.4.1 Dana Cadangan

**Rp. 0,00**

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,00,.

### 5.1.5. ASET LAINNYA

#### 5.1.5.1. Aset Lain-Lain

**Rp. 23.062.661,00**

Aset Lainnya milik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 23.062.661,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 23.062.661,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
Rusak Berat	16.800.000,00	16.800.000,00
Tidak diketahui keberadaannya (TDK)	6.262.661,00	6.262.661,00
<b>Jumlah Aset Lain-Lain</b>	<b>23.062.661,00</b>	<b>23.062.661,00</b>

#### 5.1.5.2. Aset Tak Berwujud

**Rp. 60.000.000,00**

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 60.000.000,00 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 60.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 1/1/2020	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2020
			Tambah	Kurang	
1	Aplikasi Manajemen Absen	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>

#### 5.1.5.3 Akumulasi Amortisasi

**(Rp. 60.000.000,00)**

Akumulasi Amortisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 sebesar (Rp 60.000.000,00) sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp 60.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2020 (a)</b>	<b>Rp</b>	<b>(60.000.000,00)</b>
Penambahan	Rp	-
Pengurangan	Rp	-
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))</b>	<b>Rp</b>	<b>(60.000.000,00)</b>

No	Nama Barang Inventaris	Nilai Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai buku
1	2	3	4	5
1	Aset Tak Berwujud	60,000,000.00	60,000,000.00	-
2	Aset Lain-Lainnya	23,062,661.00	-	23,062,661.00
<b>Jumlah I</b>		<b>83,062,661.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>23,062,661.00</b>

## 5.1.6 EXTRA COMPTABLE

### 5.1.6.1 Extra Comptable Peralatan dan Mesin

**Rp. 0,00**

Extra Comptable Peralatan dan Mesin milik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
Alat-alat Kantor dan Rumah tangga	-	-
Rusak Berat	-	-
Tidak Diketahui Keberadaannya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 5.1.7. KEWAJIBAN

**Rp. 23.454.071,00**

Pada tahun anggaran 2020 SKPD Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban sebesar Rp. 23.454.071,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020	31-Dec-19	Naik/Turun (%)
Utang Beban Pegawai	6,955,227	3,100,000	1.77
Utang Beban Telepon	0	0	-100
Utang Beban Listrik	12,400,774	13,921,326	65.64
Utang Beban Internet	4,098,070	0	-100
<b>Jumlah</b>	<b>23,454,071</b>	<b>17,021,326</b>	<b>-132.59</b>

## 5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### 5.2.1 Pendapatan

**Rp. 0,00**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Pendapatan-LO adalah pendapatan yang diperoleh dari PNBPF fungsional, untuk tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada penerimaan pendapatan.

### 5.2.2 Beban Pegawai

**Rp. 19.003.616.130,00**

Jumlah Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 19.003.616.130,00 dan Rp. 18.091.288.874,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-20	31 Desember 2019	Naik/Turun (%)
Beban Gaji Pokok PNS	3.814.724.976	3.813.218.024	0,04
Beban Tunjangan Keluarga	410.999.669	403.799.730	1,78
Beban Tunjangan Jabatan	236.290.000	226.760.000	4,20
Beban Tunjangan Fungsional	91.210.000	67.840.000	34,45
Beban Tunjangan Fungsional Umum	112.580.000	127.865.000	-11,95
Beban Tunjangan Beras	203.427.780	207.845.400	-2,13
Beban Tunjangan PPh/Khusus	15.359.920	13.521.269	13,60
Beban Pembulatan Gaji	51.785	54.637	-5,22
Beban Iuran Jaminan Kesehatan	0	0	#DIV/0!
Beban Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0	0	#DIV/0!
Beban Tambahan Penghasilan PNS	2.811.450.000	2.258.292.000	24,49
Beban Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JKM)	0	0	#DIV/0!
Beban Tambahan Penghasilan Uang Makan	858.000.000	763.100.000	12,44
Beban Honorarium PNS	638.320.000	1.546.370.000	-58,72
Beban Moderator	0	20.300.000	-100,00
Beban Honorarium Non PNS	9.811.202.000	8.642.322.814	13,53
<b>Jumlah</b>	<b>19.003.616.130</b>	<b>18.091.288.874</b>	<b>5,04</b>

**5.2.3 Beban Persediaan****Rp. 244.349.300,00**

Jumlah Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 244.349.300,00 dan Rp. 1.314.415.400,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>31-Des-20</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>Naik/Turun (%)</b>
Beban Persediaan Bahan Pakai Habis	140.539.300	350.518.250	-59,91
Beban Persediaan Bahan/Material	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Cetak, Penggandaan dan penjilidan	54.712.500	184.212.050	-70,30
Beban Makanan dan Minuman	49.097.500	395.565.100	-87,59
Beban Pakaian Dinas	0	244.120.000	-100,00
Beban Pakaian Kerja Lapangan	0	20.000.000	-100,00
Beban Pakaian Olahraga	0	120.000.000	-100,00
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>244.349.300</b>	<b>1.314.415.400</b>	<b>-81,41</b>

**5.2.4 Beban Jasa****Rp. 757.674.609,00**

Beban Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 757.674.609,00 dan Rp. 1.488.355.737,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-20	31 Desember 2019	Naik/Turun (%)
Beban Jasa Kantor	325.264.873	1.056.306.817	-69,21
Beban Premi Asuransi	432.409.736	256.815.920	68,37
Beban Sewa Rumah/Gedung, Gudang/Parkir	0	154.535.000	-100,00
Beban Sewa Sound System	0	4.000.000	-100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	0	3.000.000	-100,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	13.698.000	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>757.674.609</b>	<b>1.488.355.737</b>	<b>-49,09</b>

### 5.2.5 Beban Pemeliharaan

**Rp. 227.443.502,00**

Beban pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 227.443.502,00 dan Rp. 266.052.300,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-20	31 Desember 2019	Naik/Turun (%)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	227,443,502	266,052,300	-14.51
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>227,443,502</b>	<b>266,052,300</b>	<b>-14.51</b>

### 5.2.6 Beban Perjalanan Dinas

**Rp. 808.480.650,00**

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 808.480.650,00 dan Rp. 4.525.996.180,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-20	31 Desember 2019	Naik/Turun (%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	658,824,400	2,351,044,034	-71.98
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	149,656,250	2,174,952,146	-93.12
<b>Jumlah</b>	<b>808,480,650</b>	<b>4,525,996,180</b>	<b>-82.14</b>

### 5.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi **Rp. 579.886.980,00**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 579.886.980,00 dan Rp. 593.238.680,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Dec-20	31 Desember 2019	Naik/Turun (%)
<b>BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP</b>			
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	192,284,110	224,106,972	-14.20
Beban Penyusutan Alat Ukur	4,408,200	367,350	1100
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	57,713,744	98,364,981	-41.33
Beban Penyusutan Komputer	182,566,408	161,015,628	13.38
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	58,252,500	22,960,815	153.70
Beban Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	22,981,800	22,479,537	2.23
Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	15,516,667	9,310,000	66.67
Beban Penyusutan Gedung Bangunan	37,636,260	46,106,106	-18.37
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	599,166	599,166	0
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	7,928,125	7,928,125	0
<b>BEBAN PENYUSUTAN ASET LAINNYA</b>			
Beban Aset Tak Berwujud	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>579,886,980</b>	<b>593,238,680</b>	<b>-2.25</b>

### 5.2.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

**Rp. 0,00**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp. 0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2020	31 Desember 2019	Naik/Turun (%)
Beban Penyisihan Piutang PNPB			
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti			
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih Jangka Panjang-Tuntutan			
<b>Jumlah</b>			

### 5.2.9 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

URAIAN	31-Des-20	31 Desember 2019	Naik/Turun (%)
Pendapatan dari Penjualan Hibah Langsung			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara			
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu			
Penerimaan Kembali Belanja Modal tahun Anggaran Yang Lalu			
Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Tahun Anggaran Yang Lalu			
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu			
Pendapatan Sitaan/Rampasan			
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya			
Beban Kerugian Pelepasan aset			
Kerugian Persediaan Rusak/Usang			
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>			

#### 5.2.10 Beban Lain-lain

**Rp. 26.000,00**

Beban Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 26.000,00 dan Rp. 26.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk Biaya Premi Asuransi Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Rincian Beban Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-20	31 Desember 2019	Naik/Turun (%)
Beban Lain-lain Kendaraan Bermotor			
Beban Lain-lain Premi Asuransi	26.000	26.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>

### **5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

#### **5.3.1 Ekuitas Awal** (Ekuitas Awal Rp. 4.406.432.174,00)

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp. 4.406.432.174,00) dan Rp. 4.406.432.174,00.

#### **5.3.2 Surplus (Defisit) - LO** (Surplus/defisit - LO Rp. 21.621.477.171,00)

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah defisit sebesar (Rp. 21.621.477.171,00) dan Rp 26.279.373.171,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

#### **5.3.3 Penyesuaian Nilai Aset** (Penyesuaian Nilai Aset Rp. 0,00)

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset sampai dengan 31 Desember 2020 merupakan penyesuaian nilai persediaan pada tahun anggaran berjalan atas dampak penggunaan metode perpetual dan harga perolehan terakhir.

#### **5.3.4 Koreksi Nilai Persediaan** (Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0,00)

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### **5.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi** (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp. 0,00)

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan nilai perolehan atas aset tetap yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar (Rp 0,00) dan Rp0,00. Rincian untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Koreksi</b>
Peralatan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Aset Tetap Renovasi	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	-
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-
Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi	-
<b>Jumlah</b>	-

Tidak terdapat koreksi kurang Aset Tetap Lainnya.

### **5.3.6 Lain – Lain (Rp. 0,00)**

Koreksi atas Persediaan yang Belum Diregister, Peralatan dan Mesin, Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister, Aset Tetap yang Belum Diregister, Piutang TPTGR, dan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas akun tersebut untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp. 0,00) dan Rp. 0,00. Rincian koreksi terhadap akun tersebut untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Uraian Lain-lain</b>	<b>Koreksi</b>
Persediaan yang Belum Diregister	-
Peralatan dan Mesin	-
Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	-
Jaringan yang Belum Diregister	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	-
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	-
<b>Jumlah</b>	-

### **5.3.7 Koreksi Ekuitas Lainnya (Rp. 10.516.805,00)**

Koreksi Ekuitas Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar (Rp 10.516.805,00)

### **5.3.8 Ekuitas Akhir (Rp. 3.810.636.394,00)**

Nilai ekuitas pada pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.810.636,00 dan Rp. 4.406.432.174,00.

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 Pengungkapan Penting Lainnya**

Kesulitan atau kendala dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan SOPD sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pada masing masing SOPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disebabkan antara lain masa transisi penerapan dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2004 ke Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai Penyempurnaan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 atas pengelolaan keuangan daerah, disamping itu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami proses penyusunan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan SOPD tersebut, terbatasnya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi & Keuangan Daerah yang sangat membantu SOPD dalam melakukan penatausahaan serta membantu dalam pembutaan laporan. Kendala yang paling penting adalah jumlah PNS daerah yang memahami sistem akuntansi dalam menyusun laporan keuangan SOPD sangat terbatas sekali, sehingga SOPD masih merasa kesulitan dalam menyusun laporan keuangan tersebut. Untuk itu di setiap SOPD sangat diperlukan PNS berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga perlu diadakan pelatihan atau diklat dalam hal penyusunan laporan keuangan guna meningkatkan sumber daya manusia demi meningkatkan kinerja SOPD.

#### **6.2 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK**

Pada tahun anggaran 2020 SOPD Satuan Polisi Pamong Praja tidak mempunyai hasil temuan dari pemeriksaan BPK.

### **6.3 Rekening Pemerintah**

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebagai nasabah dari Bank Pembangunan Kalteng dengan nomor rekening 100.2.1675.3, dengan contact person BARU, S.Pd., M.Si. yang mana menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan INGE MAWARNY, SE yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas dana.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para stakeholders dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Januari 2021

**PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**BARU, S.Pd., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700228 199803 1 007**

---

## **DAFTAR LAMPIRAN**

---

1. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
2. Berita Acara Rekonsiliasi (ASET dan KEUANGAN)
3. Kartu Inventaris Barang (KIB)
4. Surat Tanda Setoran Sisa UYHD
5. Rekapitulasi dan Berita Acara Barang Habis pakai
6. Rekening Koran Bulan Desember 2020 (1 s/d 31 Desember 2020)
7. Berita Acara Serah Terima Mutasi Barang
8. Berita Acara Pemeriksaan Kas
9. Buku Kas Umum
10. SPJ Desember 2020